

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan Tuvalu terhadap ancaman kenaikan permukaan laut berlangsung melalui rangkaian praktik yang saling berkaitan, mulai dari konstruksi ancaman, penyebaran framing ancaman kepada audiens, hingga penerimaan ancaman dalam bentuk legitimasi kebijakan. Dalam tahap konstruksi ancaman, pemerintah Tuvalu secara konsisten merepresentasikan *sea level rise* sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara, terutama berkaitan dengan *continuity of statehood*, keberlanjutan populasi nasional, dan eksistensi wilayah negara. Konstruksi ancaman tersebut dibangun melalui berbagai tindakan diskursif dan non-diskursif, seperti pidato resmi dalam forum internasional, dokumen kebijakan nasional, representasi visual ancaman iklim, serta berbagai inisiatif politik yang menempatkan perubahan iklim sebagai persoalan keberlangsungan negara.

Pada tahap penyebaran framing ancaman, pemerintah Tuvalu memanfaatkan berbagai ruang internasional, regional, dan bilateral untuk memperluas resonansi ancaman yang dibangun. Dalam forum internasional seperti COP dan Sidang Majelis Umum PBB, pemerintah Tuvalu secara konsisten membawa isu *continuity of statehood*, *climate displacement*, dan ancaman kehilangan wilayah ke dalam pembahasan global mengenai perubahan iklim. Pada level regional Pasifik, penyebaran ancaman dilakukan melalui pembentukan posisi

kolektif bersama negara-negara kepulauan kecil Pasifik terkait *maritime rights* dan keberlangsungan negara akibat *sea level rise*. Sementara itu, terhadap Australia sebagai audiens strategis utama, penyebaran framing ancaman diarahkan pada pembentukan pengaturan konkret terkait mobilitas penduduk, keberlangsungan negara, dan stabilitas kawasan Pasifik. Proses penyebaran tersebut berlangsung bersamaan dengan penggunaan dispositif visual, perkembangan media global, dan perubahan konteks geopolitik Pasifik yang membantu memperluas resonansi ancaman yang dibawa Tuvalu.

Tahap penerimaan ancaman terlihat melalui berbagai bentuk legitimasi kebijakan yang dihasilkan pada level bilateral, internasional, dan domestik. Pada level bilateral, penerimaan Australia terhadap framing ancaman Tuvalu terlihat melalui pembentukan Falepili Union Treaty yang memuat pengaturan mengenai *climate mobility pathway*, bantuan respons bencana, dan dukungan terhadap keberlangsungan Tuvalu di masa depan. Pada level internasional, penerimaan ancaman terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap *continuity of statehood*, *climate displacement*, dan perlindungan *maritime rights* negara-negara atol kecil dalam berbagai forum internasional dan regional. Sementara itu, pada level domestik, legitimasi ancaman terlihat melalui Constitution of Tuvalu Act 2023 yang memasukkan *continuity of statehood* sebagai bagian dari posisi hukum resmi negara Tuvalu. Melalui proses tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan Tuvalu tidak berhenti pada produksi narasi ancaman, tetapi berkembang menjadi rangkaian praktik politik dan institusional yang diarahkan untuk mempertahankan keberlangsungan negara di tengah ancaman *sea level rise*.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan mengenai penerimaan ancaman oleh aktor internasional lain di luar Australia, terutama organisasi internasional dan negara-negara besar yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan norma internasional mengenai *continuity of statehood* dan *climate displacement*. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada analisis mengenai perkembangan praktik hukum internasional terkait keberlangsungan negara tanpa wilayah fisik akibat perubahan iklim.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis mengenai hubungan antara sekuritisasi perubahan iklim dengan dinamika geopolitik di kawasan Pasifik. Pembahasan tersebut penting untuk melihat sejauh mana resonansi ancaman yang dibangun negara-negara atol kecil dipengaruhi oleh kompetisi strategis negara besar di kawasan.

